

Memahami Absurditas Intermestik Indonesia

Adi Mulia Pradana

*Legislative Advisor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia*

e-mail: adimulia@gmail.com

ABSTRACT

As a country which has now become the main driving force of the economy of ASEAN, Indonesia not only has the responsibility to maintain the stability of the leadership of the economy. But also give concrete solutions and take action so that ASEAN is no longer experiencing economic crisis. As well as the views of the current state of contemporary, reducing the risk of slowing global economy as still the continued economic crisis in Europe. Each country has the right to present policy options cannot be dipkasa uniformly in the handling of the impact of the recession. The role of Indonesia in the present policy line towards the AEC, analyzed its effectiveness maintain regional economic stability associated components supporting Indonesia's domestic economy. The Problem of perception in intermestik, between the reality in the domestic and foreign expectations against Indonesia, should make Indonesia not to run against a variety of things that are actually quite trapping many parties in Indonesia in facing the economic growth rate of Indonesia itself. Do the optimization of economic growth over reducing inequality in the domestic economy, will be the key to how Indonesia can play a role in economic balance in the region.

Keywords: *intermestic, ASEAN Economic Community, balance, gap, economic growth.*

Sebagai negara yang kini menjadi penggerak utama perekonomian ASEAN, Indonesia bukan hanya memiliki tanggungjawab kepemimpinan kawasan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Tetapi juga memberikan solusi dan melakukan tindakan konkrit agar ASEAN tak lagi mengalami krisis ekonomi. Serta dilihat dari keadaan kontemporer saat ini, mengurangi risiko atas melambatnya perekonomian global seiring masih berlanjutnya krisis ekonomi di Eropa. Tiap negara berhak hadirkan pilihan kebijakan yang tidak bisa dipkasa seragam dalam penanganan dampak resesi. Peran Indonesia dalam kebijakan yang hadir seiring menuju AEC, dianalisis efektivitasnya menjaga kestabilan ekonomi regional dikaitkan komponen pendukung ekonomi Indonesia di domestik. Problem persepsi secara intermestik, antara realita di dalam negeri dan ekspektasi pihak asing terhadap Indonesia, diharap menjadikan Indonesia tidak lengah terhadap berbagai hal yang sebetulnya cukup menjebak berbagai pihak di Indonesia dalam menyikapi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sendiri. Melakukan optimalisasi pertumbuhan ekonomi seiring mengurangi ketimpangan ekonomi di dalam negeri, akan menjadi kunci bagaimana Indonesia bisa berperan lebih besar dalam keseimbangan ekonomi di tingkat kawasan.

Kata-Kata Kunci: *intermestik, ASEAN Economic Community, keseimbangan, ketimpangan, pertumbuhan ekonomi*

Menyadari Ketimpangan dan Salah Perspektif

Suatu lembaga konsultan keuangan internasional yang baru tahun ini akhirnya membangun kantor cabang di Indonesia, memberi laporan bahwa kenaikan jumlah warga superkaya di Indonesia adalah yang tertinggi di Asia (25 persen). Di Bursa New York, kegiatan “Indonesia Investment Day” (IID) digambarkan cukup ramai dengan makin banyaknya pengusaha kakap di AS untuk lebih banyak berinvestasi langsung di Indonesia.

Belum cukup atas hal itu, keberadaan Indonesia makin dibangga-banggakan saat Sidang Tahunan Majelis Umum PBB menuju peringatan 67 tahun PBB. Baik karena terpilih sebagai panel khusus pasca Millenium Development Goals (MDG) 2015 bersama Liberia dan Inggris, serta masih menjabat sebagai anggota Dewan HAM PBB. Dalam konteks MDG, terpilihnya Indonesia sebagai salah satu panel artinya PBB menganggap Indonesia sebagai gambaran pembangunan ekonomi berkelanjutan di Asia.

Mungkin saat pertemuan tingkat tinggi G-20 akhir tahun ini di Mexico, akan makin banyak lagi catatan positif secara makro terkait Indonesia. Apalagi pada enam bulan pertama di 2012, dari semua negara G-20, hanya Indonesia yang mencatat pertumbuhan ekonomi paling tinggi secara persentase (6,7 persen). Bahkan artinya mengalahkan China dan India yang selama satu dekade sempat mencatat 9-11 persen, dimana untuk 2-3 tahun terakhir cukup melambat (World Bank 2012, 71).

Semua catatan positif selalu tak luput catatan negatif. Daya saing negara ini justru turun dari 48 di tahun 2011 menjadi 50 di tahun 2012. Sekalipun IID terlihat amat meriah dan membanggakan, dan sekalipun diberitakan bahwa delegasi Indonesia di PBB banyak ditunggu menteri setingkat dari banyak negara lain, tapi faktanya dalam tujuh tahun Indonesia menyelenggarakan Indonesia Infrastructure Summit, tak pernah sekalipun investasi langsung terbukti bisa direalisasikan diatas 40 persen.

Proses diselenggarakannya MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia), untuk lebih mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang diprediksi bisa membengkak hingga 1000 triliun untuk lima tahun ke depan pun, ternyata juga tak cukup mempercepat pembangunan infrastruktur dalam satu tahun terakhir. Termasuk juga tak secara akseleratif meningkatkan minat investor asing untuk benar-benar berinvestasi langsung, bukan sebatas menjanjikan saja.

Bisa jadi, sebetulnya Indonesia justru amat rugi dalam 5-6 tahun terakhir dengan pertumbuhan ekonomi hanya 6-7 persen, di saat potensi yang bisa dihadirkan sebetulnya mencapai dua digit, 10-11 persen, sekalipun di tengah krisis global dan perlambatan ekonomi dari 3 kekuatan ekonomi Asia seperti China, India, dan Jepang yang cukup mengalami dampak mendalam atas berlarutnya krisis 2007-2008 (Chellaney 2010, 27). Makin ironis, publik cenderung amat bangga hanya dengan kestabilan ekonomi dan atau pertumbuhan ekonomi yang sebetulnya bisa dikatakan “hanya” 6-7 persen, hanya karena ekonomi global sedang melambat dengan rata-rata pertumbuhan hanya 2-3 persen dalam 5 tahun terakhir.

Melihat di luar isu ekonomi, akan terjadi *gap* yang lebih besar lagi antara pandangan internasional dengan realita kritik yang dilakukan publik dalam negeri. Masalah korupsi yang begitu lambat untuk “naik rating” lebih bersih dari tahun ke tahun misalnya. Juga terkait keanggotaan Dewan HAM PBB yang dijabat Indonesia, sementara disisi lain Indonesia bukan hanya dicecar dalam sidang Universal Periodic

Review 2012 karena berbagai masalah HAM. Tapi fakta bahwa mulai makin banyak kasus atau kejadian yang mencederai nilai-nilai HAM ataupun konflik horizontal lainnya.

Jika memang negara kita menjadi ladang subur karena potensi ekonominya yang tumbuh stabil dan menjanjikan, sehingga banyak negara menunggu untuk berinvestasi, kenapa respek itu tak atau kurang hadir dalam menghargai keberadaan warga kita di luar negeri, yang masih sering dilecehkan masyarakat negara-negara tertentu? Jika konon perekonomian Indonesia amat dipuji banyak negara, kenapa masih banyak sekali ketimpangan keadaan kemakmuran dan atau potensi pertumbuhan yang tersia-siakan? Bisa jadi, dalam menyikapi segala potensi, tantangan, dan titik lemah Indonesia, publik tidak cukup mendalam menyadari bahwa sedang terjadi ketimpangan menyikapi situasional yang ada, karena saling berbedanya perspektif yang dipakai.

Mengkhawatirkan “Oil Bonanza” Kembali Disia-siakan

Selalu ada cerita romansa yang pahit atas kemakmuran Indonesia di sekitar 70-an. Sebetulnya jika ditarik lebih awal, pada dekade 50-an pun Indonesia juga punya romansa pahit atas potensi kemakmuran saat itu. Hal yang sering disorot ialah lemahnya pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDA).

Pada era 50-an, Indonesia dengan bangganya menjadi salah deklarator dan inisiator Konferensi Asia Afrika 1955. Selanjutnya, beragam proyek *mercusuar*, dengan simbol bangunan-bangunan amat raksasa bisa dibangun, disaat mungkin negara-negara Asia-Afrika lainnya baru bisa membangun hal serupa pada 90-an. Hotel Indonesia, Jembatan Ampera, Gedung MPR-DPR, hingga Gelora Bung Karno, tentu membutuhkan pasokan dana dalam negeri yang amat besar, sekalipun dimasa itu bangunan-bangunan tersebut juga dibangun melalui dana hutang luar negeri.

Dekade 50-an diawali dengan Perang Korea pada masa itu. Akibatnya, berbagai komoditas yang terkait dengan perang tersebut, meningkat drastis harganya. Utamanya karet dan minyak bumi. Indonesia pun saat itu mengalami “Bonanza Economy”, sekalipun tak terlalu lama. Juga menjadi berkah bagi pemerintahan Soekarno saat itu, yang 4 tahun berperang mempertahankan kemerdekaan (1945-1949) hingga dana negara nyaris kosong.

Penjualan karet dan minyak saat itu cukup membantu mengisi kekosongan anggaran negara. Sayangnya, tak ada upaya dari Soekarno saat itu untuk melangkah lebih jauh, untuk memutar sedemikian rupa dana devisa yang ada, untuk merintis industrialisasi misalnya. Praktis, perusahaan atau usaha nasional yang benar-benar eksis saat itu dan bisa berkembang mempertahankan eksistensinya hingga kini hanya Semen Gresik dan GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia). Rumitnya, dalam 5-10 tahun setelah Perang Korea, akhirnya Indonesia terjebak dalam pembangunan simbolis.

Bukannya bangunan-bangunan tersebut tak memiliki nilai ekonomi, tapi tentu tak sebesar jika Soekarno saat itu memulai rintisan industrialisasi melalui tindakan pemakaian anggaran yang lebih bijak. Jelas Indonesia tertinggal jauh sejak 60-an oleh Jepang, Thailand, dan bahkan Korea Selatan itu sendiri, sebagai 3 negara Asia yang bisa dikatakan memiliki visi industri jangka panjang sebagai upaya meningkatkan kemakmuran warganya serta memeratakannya. Utamanya ketiga negara saat itu sudah

mengenal industri otomotif, sehingga ketiga negara ini hingga saat ini masih dianggap sebagai penggerak utama otomotif Asia.

Indonesia memiliki peluang untuk belajar dari kesalahan di dekade 50-an, karena ternyata “Bonanza Economy”, utamanya karena minyak, kembali berulang dan bahkan berlangsung jauh lebih lama. “Bonanza Economy” karena meroketnya harga minyak berlangsung cukup lama, dari 1973 hingga mendekati akhir 70-an. Awalnya semua negara berharap tak ada lagi kejadian yang mengganggu perekonomian internasional saat itu, karena efek embargo mulai mereda. Tapi tiba-tiba, diawal 80-an, terjadi perang sesama produsen minyak, Perang Irak-Iran. Jika “Bonanza Economy” sebelumnya lebih karena kesengajaan kelangkaan sistemik, tapi pada konteks Perang Irak-Iran, terjadi kelangkaan pasokan minyak karena ketidaksengajaan sebagai dampak perang. Tentu saja “Bonanza Economy” kembali berlangsung, utamanya bagi negara-negara yang produksi minyak buminya surplus, seperti Indonesia saat itu.

Disinilah “romansa pahit” atas keadaan cukup makmur atau lebih makmur selalu dikenang. Tiba-tiba dalam kurun 70-an, dengan limpahan dana yang ada, banyak sekali pembangunan infrastruktur dilakukan. Selanjutnya, “romansa pahit” itu berkembang ke arah tindakan kemanusiaan, misalnya membantu Malaysia membangun ekonominya, dengan mengirim ribuan guru-guru terpilih saat itu. Di sisi lain, Malaysia secara hati-hati terhadap pendapatan yang ada, karena saat itu Petronas belum sebesar Pertamina, melakukan visi tindakan jangka panjang perusahaan. Hal itu berbanding terbalik dengan Pertamina yang karena “kelebihan” pemasukan, menjadi perusahaan yang ceroboh mengelola keuangan yang ada, diperparah korupsi yang berlangsung di Pertamina.

Lebih besar lagi cakupannya, pemerintah Indonesia saat itu juga tak bijak memutar pendapatan. Dalam konteks pembangunan infrastruktur besar-besaran, bisa jadi itu langkah bijak. Tapi selebihnya dana yang ada, tak cukup dioptimalkan untuk membangun industri secara lebih masif. Bandingkan dengan Singapura yang jauh lebih terbatas secara dana, mampu membangun kawasan industri Jurong yang jauh lebih besar saat itu dibanding kawasan industri yang dibangun Indonesia saat itu (Drysdale 1984, 62). Belum lagi Malaysia yang juga tak sebanyak limpahan dana yang didapat pemerintah Indonesia, tapi mampu membangun kawasan industri Petaling dan Port Klang.

Industri memang bukan faktor tunggal-mutlak membangun perekonomian suatu negara. Tapi industri adalah tindakan ekonomi untuk merintis kemandirian suatu bangsa memproduksi sendiri komoditas yang diolah sedemikian rupa agar tak tergantung pada negara yang ekonominya lebih mapan. Juga merintis kemampuan mengolah suatu bahan mentah untuk memiliki nilai tambah sebagai korelasi pengolahan. Juga dengan surplus produksi saat konsumsi penduduk dalam negeri menyisakan kelebihan, bisa kemudian dijual atau diekspor.

Belum lagi, industri langkah efektif untuk menyegerakan lapangan kerja semasih mungkin, disaat suatu negara masih amat tinggi tingkat penganggurannya. Inilah yang dipahami Singapura dan Malaysia yang secara jangka panjang membangun visi industri, disaat pada 70-an masih memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Benar bahwa secara PDB saat ini, Indonesia tak mungkin lagi dikalahkan Malaysia dan Singapura, tapi itu wajar dengan 240 juta jiwa jika dibanding 20 juta jiwa (Malaysia) atau 5 juta (Singapura). Tapi pendapatan kapita Indonesia (4000-4500 dolar) saat ini masih amat tertinggal jika dibanding Malaysia (23 ribu dolar) atau Singapura (42 ribu dolar). Bahkan perlu diingat, saat krisis 1997-1998, PDB Malaysia dan Singapura

masing-masing bisa mengalahkan PDB Indonesia saat itu, sekalipun saat itu Indonesia memiliki 190 juta jiwa (Nathan 2001).

“Bonanza” semacam yang terjadi di 50-an dan 70-an sebetulnya kembali terjadi lagi di Indonesia. Memang bukan lagi minyak. Justru minyak kini jadi beban amat berat dalam APBN, utamanya dalam hal subsidi. Indonesia sudah masuk dalam negara-negara yang tergolong cukup akut dalam permasalahan subsidi pemakaian BBM bagi masyarakatnya dibanding negara lain (Anon 2012). Dalam laporan IMF terbaru pun, sekalipun masih optimis atas pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan catatan agak dipangkas, potensi tumbuh Juli-Desember 2012 adalah 6 persen dari prediksi IMF sebelumnya 6,3 persen, sebetulnya IMF mengkhawatirkan fiskal Indonesia (IMF 2012).

Dalam pantauan atas rapat anggaran di DPR pun, yang dikhawatirkan IMF ada benarnya. Dimana DPR dan pemerintah menyepakati angka subsidi BBM untuk asumsi RAPBN 2013 mencapai 193 triliun. Padahal angka tersebut bisa dipakai lebih bijak untuk pembangunan infrastruktur ekuivalen dengan 500 kilometer jalan tol atau membiayai pembangunan 2 bandara bertaraf internasional. Menurut IMF, harusnya pemerintah bisa lebih mengutamakan percepatan pembangunan infrastruktur yang akan lebih mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, jika saja APBN tak terlalu banyak dialokasikan untuk subsidi BBM. Dengan kata lain, bukan SDA dalam bentuk minyak yang saat ini dikatakan sebagai meroketnya jumlah penduduk kaya Indonesia, sekalipun sebetulnya perlahan memperbesar ketimpangan ekonomi.

“Bonanza” yang kini terjadi ialah menyangkut batubara dan kelapa sawit. Dalam lima tahun, tren harga batubara mengalami peningkatan pesat, sekalipun dalam beberapa bulan terakhir mengalami penurunan harga pasaran internasional. Bahkan sejak sekitar 2000, banyak pengusaha yang beralih profesi menjadi pengusaha batubara dan kelapa sawit selepas krisis dan juga menjadi kaya raya. Disinilah ironi atas pengelolaan SDA, yang dikhawatirkan hanya akan kembali mengulang dibiarkannya “Bonanza Economy” seperti saat dekade 50-an dan 70-an.

Di satu sisi, sekarang begitu kaya raya beberapa pengusaha batubara atau kelapa sawit bahkan sekalipun hanya memiliki lahan terbatas. Ironisnya, di sisi lain, saat pemerintah Indonesia mendesak siapapun pelaku pertambangan untuk menaati Peraturan Menteri yang mengharuskan semua pengusaha dalam bentuk komoditas apapun untuk megolah lebih dulu hasil produksinya. Dalam hal batubara, bisa dijadikan menjadi briket misalnya. Atau bentuk olahan tahap pertama terhadap batubara yang lebih maksimal menghasilkan energi utamanya pada industri skala makro yang membutuhkan pasokan energi amat besar untuk operasionalnya. Sementara kelapa sawit bisa diolah lebih dulu menjadi minyak kelapa sawit yang nilai tambahnya jauh lebih besar dibanding dijual mentah.

Sayangnya, hanya perusahaan skala nasional saja yang bersedia melakukan pengolahan. Padahal pengusaha dengan lahan tak terlalu besar pun sebetulnya mampu melakukan pengolahan tahap sederhana. Maka wajar, yang terjadi ialah amat banyaknya kapling-kapling lahan tambang batubara atau lahan perkebunan sawit. Pengusaha “kapling” ini hanya lebih suka membeli bentuk-bentuk kemewahan, atau menaruh uangnya dalam lembaga jasa keuangan eksklusif berskala internasional yang sejak dua tahun ini meningkat pesat kehadirannya di Indonesia. Padahal andai bersedia “mengalah” untuk taat pada aturan pemerintah, untuk lebih menyalurkan perputaran uang pendapatan untuk dibangun unit pengolahan lebih lanjut, secara jangka menengah mereka sendiri yang akan mengalami keuntungan amat besar.

Ironisnya, justru karena pengusaha dan atau investor asing paham nilai tambah jangka panjang pengelolaan batubara dan kelapa sawit, justru investor asing inilah yang tak masalah membeli seluas mungkin lahan batubara atau kelapa sawit yang masih bertebaran belum dikelola di Indonesia. Bahkan sebelum Peraturan Menteri itu hadir, sudah sejak sekitar lima atau enam tahun lalu para investor asing membeli seluas mungkin lahan batubara atau kelapa sawit Indonesia dan sudah sejak awal membangun unit pengolahannya.

Wajar jika hingga kini, konteks batubara, tak ada satupun perusahaan Indonesia yang bisa menyaingi perusahaan batubara skala global dari China, Australia, hingga Brasil. Padahal lahan batubara Indonesia tak kalah luas dibanding yang terdapat di tiga negara tadi yang sama-sama punya wilayah amat besar. Serta lahan batubara Indonesia memiliki kepadatan deposit dan kualitas batubara yang tak kalah dibanding tiga negara tersebut misalnya. Ironisnya, salah satu perusahaan batubara terbesar Indonesia justru kini mengalami ancaman kolaps.

Sementara dalam komoditas kelapa sawit, sekalipun lebih banyak perusahaan swasta nasional dalam skala usaha cukup besar dilihat dari kepemilikan lahan sawit yang berkiprah, tapi tetap saja banyak perusahaan Singapura dan Malaysia yang justru mendapatkan pemasukan amat besar karena operasional target pasarnya adalah warga Indonesia dan juga memiliki lahan amat luas di Indonesia.

Tidak bermaksud membatasi potensi ekonomi Indonesia hanya dari batubara dan kelapa sawit. Tapi parameter pengelolaan batubara dan kelapa sawit menjadi gambaran betapa secara garis besar pihak-pihak terkait masih amat kurang dalam tindakan riil untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Indonesia. Bisa jadi, secara ekstrem, jika pemerintah pun merasa perlu mengubah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dijadikan khusus membangun jalan tol untuk menyegerakan pembangunan tol, seharusnya pemerintah juga perlu membuat lembaga/BUMN khusus terkait batubara dan kelapa sawit. Nyaris kolapsnya perusahaan swasta nasional batubara, sementara perusahaan asing yang bergerak di batubara dan kelapa sawit justru makin agresif menggarap potensi batubara dan kelapa sawit, membuktikan betapa lemahnya pengelolaan potensi SDA di negeri ini oleh pengusaha kita sendiri.

Ironisnya, seperti kebanyakan daerah-daerah di Indonesia yang kaya batubara dan kelapa sawit, justru di daerah tersebut amat parah terjadi kerusakan infrastruktur. Tidak ada upaya mengalah antara pemerintah dan pengusaha (atau keduanya) untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap daerah dan masyarakat di sekitar tempat operasional perusahaan batubara atau kelapa sawit. Benar, bahwa pembagian pertumbuhan ekonomi secara nasional makin terdesentralisasi sehingga tak lagi terlalu bergantung Jakarta. Tapi tak ada imbal balik yang setimpal untuk perbaikan daerah tersebut secara fisik dan signifikan.

Daerah semata menghasilkan devisa amat besar melalui batubara dan kelapa sawit yang dijual mentah besar-besaran, padahal akan bisa lebih besar lagi jika diolah lebih dulu. Apalagi jika di suatu daerah jauh lebih banyak terdapat pengusaha “kapling” dimana sekalipun tetap menjadi amat kaya, tapi pendapatan dari usaha tambang/perkebunan menguap begitu saja karena aktivitas konsumtif begitu tinggi. Disinilah kemudian bisa dipetakan lebih luas lagi seperti apa kondisi ekonomi saat ini yang serba “aneh” antara pendapat pihak asing dibanding pendapat sebagian masyarakat kita sendiri yang malah skeptis. Fenomena kaya mendadak dari sebagian kecil pengusaha “kapling” atas SDA tertentu seperti batubara atau kelapa sawit, ternyata juga menjadi fenomena yang lebih luas dalam memetakan seperti apa laju

pertumbuhan warga kelas menengah atas di Indonesia setidaknya dalam lima sampai delapan tahun terakhir. Terjadi banyak sekali peningkatan pendapatan kapita secara tajam ditunjang kuantitas kelompok ini yang cukup banyak yang naik level ke kelas atas. Tapi kelompok ini menjadi amat konsumtif pada aspek tindakan yang tak memberi nilai tambah lanjutan dan sebatas membelanjakan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri.

Memang kemudian wajar jika perekonomian atau perdagangan dalam negeri menjadi sangat likuid karena tingkat konsumsi yang sangat tinggi dari kelompok menengah, dari kelompok menengah yang naik level ke kelas atas, dan kelas atas itu sendiri. Tapi pembelanjaan mereka atas pendapatan yang didapat, tak banyak membantu nilai tambah bagi kelompok masyarakat lainnya. Argumen itu selaras dengan pola pengelolaan usaha atas SDA yang menjadi contoh.

Keengganan pengusaha “kapling” yang sebetulnya cukup mampu memodali sendiri pembiayaan pembangunan unit pengolahan agar mematuhi Peraturan Menteri terkait pengolahan nilai tambah komoditas, akhirnya menghilangkan potensi nilai tambah lebih besar untuk orang lain. Misalnya pekerja pertambangan/perkebunan mereka sendiri yang stagnan dalam produksi karena tak dimodali peralatan yang lebih canggih. Dilema ini diperparah dengan lingkaran dilema lainnya.

Dimana saat pengusaha tak mau lebih “berkorban” memodali sendiri upaya pengolahan karena hanya ber-mindset “jual mentah sebanyak mungkin”, potensi SDA daerah tersebut jadi lebih berisiko terkuras terlalu cepat dibanding prediksi habisnya deposit batubara atau prediksi tak lagi produktifnya suatu perkebunan sawit. Pemerintah pun juga tak merasa bersalah jika kemudian tak maksimal menyediakan infrastruktur pendukung, karena pengusaha “kapling” setempat pun tak mau lebih keras mengolah SDA yang jadi sumber kekayaan mereka sendiri.

Maka jika pada kurun waktu 2000-2008 China bisa menunjukkan pertumbuhan ekonomi hingga 2 digit (9-11 persen), sebetulnya Indonesia juga mampu mencapai hal tersebut. Sayangnya, dalam empat tahun terakhir, yang paling menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah tingkat konsumsi dalam negeri, yang nilai tambah atas aktivitas ekonomi lainnya tak signifikan. Rumitnya, kenaikan pesat konsumtivisme tersebut lebih banyak dilakukan oleh kalangan pengusaha-pengusaha ekstraktif/SDA yang sebetulnya berpeluang mencetak penghasilan lebih besar lagi jika mau berinvestasi lebih visioner, yaitu menaati aturan Peraturan Menteri, tapi juga menambah nilai guna pekerja mereka sendiri dengan bersedia membiayai pembelian peralatan yang lebih canggih untuk pengolahan lebih lanjut.

Sayangnya, jarang sekali pengusaha “kapling” yang mau susah payah berinvestasi dan atau bervisi jangka panjang seperti ini. Bahkan perusahaan skala nasional pun, kadang juga tak agresif melakukan permodalan untuk pengolahan SDA. Wajar jika belum ada satupun perusahaan Indonesia dengan bidang komoditas SDA bisa menembus 500 perusahaan raksasa global, sekalipun negara ini amat kaya SDA, dan kebetulan tak mengalami dampak krisis finansial separah negara lain, utamanya yang tingkat ketergantungan atas pasar finansialnya amat tinggi dan pasar finansialnya nyaris kolaps sepanjang 2007-2008 (Esenstein 2011, 74).

Dengan kata lain, saat 5 tahun pasca resesi global banyak pelaku usaha kita lebih suka sesegera mungkin menikmati “hasil” tanpa mau lebih “mengalah” melakukan visi jangka panjang perusahaannya, 5 tahun pula Indonesia atau siapapun pengusaha Indonesia mengabaikan peluang untuk menjadikan perusahaannya berkembang lebih

akseleratif. Di saat perusahaan sejenis dari negara lain sebetulnya masih harus mengatasi dampak krisis finansial sehingga hanya secara tipis mengalami kemajuan produktivitas.

Wajar pula, bukan hanya lembaga pengelola keuangan eksklusif tingkat internasional yang selama ini menganggap Indonesia negara “biasa dan bukan target pelanggan”, dalam 2 tahun terakhir banyak kemudian membangun kantornya di Indonesia karena menyadari besarnya tingkat konsumtivisme kelompok kaya baru di Indonesia. Belum termasuk produsen berbagai barang mewah eksklusif yang selama ini tak pernah membuat gerainya di Indonesia, dalam tiga atau empat tahun terakhir akhirnya membangun gerainya di Indonesia karena tingkat konsumtivisme yang begitu tinggi, utamanya kelompok atas, menengah-atas, serta kelompok menengah Indonesia. Angka 6-7 persen dalam lima tahun terakhir sebagai pertumbuhan ekonomi Indonesia, harusnya tak membuat bangga, tapi justru menyesal kenapa tak bisa lebih optimal, karena keterlanjuran tindakan konsumtivisme dari para kelompok atau lapisan masyarakat yang secara pesat mengalami kenaikan kekayaan. Artinya, memang terjadi kesalahkaprahan dalam cara pandang memaknai apa yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Memperbaiki Ketimpangan Intermedial: Menyelaraskan Pertumbuhan Indonesia dengan Regional

Wacana ASEAN Infrastructure Pooling Fund (IPF) dan segala hal menyangkut ASEAN Economic Community 2015 makin dimatangkan pada Konferensi Tingkat Menteri Ekonomi (KTM) ASEAN ke-44. IPF sendiri dijadikan kebijakan pendukung yang dibutuhkan untuk menopang ASEAN Economic Community (AEC) 2015. IPF diarahkan sebagai lembaga pengelola dana infrastruktur bersama, hampir mirip dengan European Regional Development Fund di dalam mekanisme Uni Eropa (UE). IPF ini telah terbentuk pada tahun 2011. Tantangan IPF salah satunya merapikan tingkat akuntabilitas keuangan dari tiap negara ASEAN.

Masih sering terjadi korupsi pembiayaan infrastruktur di berbagai negara ASEAN, dimana negara di Asia Tenggara juga masih sering menghadapi masalah akuntabilitas laporan keuangan, padahal sejak resesi global hadir, timbul kerentanan makin besar atas tiap penggunaan dana ataupun tiap transaksi keuangan, utamanya di pasar modal misalnya (Nesadurai dan Djiwandono 2008, 51-52). IPF baru bisa signifikan ketercapaian pembentukan jika tiap negara ASEAN memperbaiki akuntabilitas pembiayaan infrastrukturnya. Terlebih tantangan pembiayaan tambahan anggaran (misal BBM) yang tentu dialami tiap negara ASEAN pula, akan memberi tantangan tiap menteri keuangan serta pejabat fiskal dan moneter kawasan ini. Karena pembengkakan anggaran pada sisi konsumsi atau desakan subsidi, akan hilangkan momentum pembiayaan infrastruktur yang harusnya lebih optimal. Sementara tantangan ekonomi di tingkat regional harus segera dihilangkan, sehingga tiap pihak bisa lebih tingkatkan kemampuan jika hadir lagi masalah ekonomi yang dampaknya mengglobal (Chufrin 2007, 32-34).

Hal lain yang didapat dari KTM Keuangan ini ialah makin intensnya pembahasan akan ASEAN Plus Three Macroeconomic Research Office (AMRO). AMRO bisa dikatakan sebagai institusionalisasi niatan ASEAN Plus Three (APT) yang telah mengawali dana darurat. AMRO bisa pula dinyatakan sebagai tahap lanjut Chiang Mai Initiative (CMI). Awalnya dari 3 negara Asia Timur ini diminta menyediakan dana darurat gabungan 80 miliar dollar, sementara lima negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Philipina,

Singapura, Thailand, dengan dana gabungan 40 miliar dollar. Jika lebih leluasa secara anggaran, angkanya ditingkatkan dengan 80 miliar dollar untuk tiap negara di pihak Asia Timur, sementara 40 miliar dollar AS sebagai kewajiban tiap negara di pihak lima negara ASEAN.

Asia Development Bank (ADB) tak bisa seperti European Central Bank (ECB) yang memiliki dana melimpah kiranya untuk *bailout*. Juga karena ADB tak bisa berperan seperti IMF dalam penyaluran *bailout*. Sebagai contoh, dengan hadirnya Pakta Stabilitas Moneter Eropa, hadir jaring pengaman (*Safety Net*) sebesar 500 miliar Euro, yang pemakaiannya, oleh Yunani, Irlandia, dan kini Portugal, harus mengikuti aturan pengetatan radikal atas anggaran sebagai syarat restrukturisasi hutang. Untuk September 2012 saja, European Stability Mechanism (ESM) mulai digulirkan penambahan dananya, dengan modal 500 miliar Euro dari Jerman, setelah “lolos” dari Mahkamah Konstitusi setempat yang kemudian diratifikasi dan disetujui Presiden beserta Kanselir Jerman pada 27 September 2012.

Awalnya banyak warga Jerman menolak upaya pemerintah Jerman terlalu “banyak membantu” negara Eropa lainnya, karena dana *bailout* yang digulirkan Jerman sebetulnya berhak dipakai warga Jerman sendiri. Hanya karena Jerman menjadi tulang punggung UE, sehingga terlalu besar beban ekonomi yang harus ditanggung Jerman untuk menopang negara-negara UE yang mengalami krisis. Begitu besarnya biaya yang harus dikeluarkan sebagai negara yang terlalu menanggung beban untuk mengatasi keseluruhan krisis *eurozone*, karena banyak sekali perbankan di Uni Eropa memiliki *linkage* pada perbankan AS sebagai titik masalah utama dalam krisis *subprime mortgage* di AS (Stiglitz 2009, 35-37).

Angka sebesar itu tentu tak mungkin bisa dengan mudah disiapkan negara-negara Asia Tenggara secara parsial dan mendadak. ADB paham bahwa Indonesia sekalipun menjadi negara terbesar di ASEAN, tak mungkin bisa melakukan tindakan serupa Jerman jika Asia Tenggara kembali mengalami krisis seperti pada 1997-1998. Indonesia juga paham bahwa untuk mencegah krisis eropa menjadi berdampak terlalu besar di Asia Tenggara terlebih seiring AEC 2015 nantinya, harus sejak lama dirancang suatu mekanisme saling membantu untuk mencegah tiap kemungkinan terburuk dalam pelaksanaan AEC. Bukan secara mendadak seperti yang terlanjur terjadi di UE pasca krisis global 2007-2008.

Bisa dikatakan, APT membentuk AMRO sebagai upaya mengurangi ketergantungan negara-negara Asia Tenggara terhadap IMF, jika dalam dua sampai tiga tahun kedepan terjadi pengulangan krsisis ekonomi seperti 2007-2008 atau pun 1997-1998. Dengan hadirnya AMRO, menjadi benteng paling awal bagi negara – negara APT dalam hal konsultasi jika terjadi kolaps pada salah satu negara APT. *Safety Net* ini yang juga dibangun ASEAN melalui AMRO. Melalui tambahan perangkat kebijakan untuk SEACEN Center, *Safety Net* yang dijalankan di ASEAN harus lebih dahulu memenuhi salah satu aspek di tingkat antar bank sentral, yaitu penciptaan *Cross Border Banking Supervision*.

ASEAN memang bukan UE yang mampu mencapai integrasi moneter melalui keberadaan Euro, ECB, dan European Monetary Institute. Tapi ASEAN belajar dari pengalaman krisis Asia 1998, ditambah kejadian bahwa integrasi sebaik di UE pun tak mampu mencegah terjadinya kolaps. Terlebih baik ASEAN dan UE cenderung apatis akan peran IMF (apalagi Indonesia). Meski kebijakan restrukturisasi hutang dan *great moderation* pernah berhasil di Argentina, tapi keberhasilan Argentina tak bisa dikatakan sebagai jasa IMF.

Sebagai contoh adalah Yunani sendiri, yang mendapat bantuan dari ECB dan IMF. Sejak September 2012, pemerintah Yunani menyampaikan keberatan (terhadap ECB dan IMF) karena makin terbebannya berbagai masalah sosial karena diharuskan melakukan banyak PHK untuk lebih menghemat anggaran, yang menimbulkan (makin banyaknya) demo. Dengan menghindari negara-negara Asia Tenggara agar tak mengulang kasus Yunani yang terpaksa hadirkan IMF (tak hanya ECB), juga trauma atas kejadian di Indonesia sendiri pada 1997-1998, mendorong Indonesia sebagai inisiator paling aktif dalam mendorong terbentuknya AMRO (Nesadurai dan Djiwandono 2008, 51-52).

Indonesia sebagai negara penggerak utama pertumbuhan ekonomi di tingkat kawasan, terlepas berbagai kelemahan di banyak hal yang belum dioptimalkan Indonesia, berusaha membantu menyelaraskan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tak timpang dengan capaian pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara lainnya yang cenderung makin melambat. Tantangan yang paling mungkin akan dihadapi Indonesia dan atau seluruh negara Asia Tenggara untuk saling menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, ialah mulai hadirnya tanda awal resesi di Vietnam.

Bukan hanya anjloknya daya saing Vietnam, bisa jadi juga terlalu berlarutnya masalah bilateral Vietnam dengan China, sehingga menghambat perekonomian Vietnam itu sendiri yang sebetulnya masih cukup tinggi ketergantungannya dengan China. Maka dengan hadirnya masalah bilateral beberapa negara ASEAN dengan China, sementara disisi lain sudah berlangsung ACFTA dan makin dekatnya AEC 2015, ditambah potensi perlambatan ekonomi global akan makin besar dalam 2013-2015, wajar jika yang sedang dan akan terjadi di Vietnam menjadi salah satu tolok ukur bagaimana ASEAN menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi.

Dana awal AMRO saat ini, 120 miliar dollar, 80 miliar dollar dari 3 negara Asia Timur dan 40 miliar dari 5 negara ASEAN, terus ditingkatkan seiring peningkatan devisa dan keleluasaan anggaran negara APT. Jika terjadi penurunan signifikan devisa dan atau prediksi ketidakmampuan melunasi hutang dengan anjloknya peringkat hutang salah satu negara APT, fungsi pengawasan AMRO pada negara itu akan makin diperketat jika keuangan negara itu bisa disehatkan tanpa harus lakukan *bailout*. IPF dan AMRO sebagai institusional yang menunjang CMI menyiratkan kebutuhan integrasi akuntabilitas regional sebagai tindakan komprehensif berbagai negara kawasan tertentu (dalam hal ini APT) membangun kebijakan tak saling merugikan satu sama lain. Juga minimalkan kemungkinan gegabah suatu negara dalam perencanaan anggaran yang harusnya makin hemat di masa pasca resesi.

Memperbaiki Resiprositas Antara Indonesia dan ASEAN

Selain institusionalisasi IPF dan AMRO, hal menarik dari KTM ASEAN di Siem Reap (Agustus 2012) ialah disempurnakannya tahap lanjut integrasi antar bursa ASEAN. Cita-cita ini sudah hadir sejak 2003 pada KTT ASEAN di Bali, menyikapi mulai pulih dan stabilnya tiap negara ASEAN, utamanya Indonesia, dari dampak krisis 1998 (Arner 2007, 81-83). Terlebih performa bursa dari lima negara utama ASEAN, sejak 2004 dinilai tumbuh signifikan dan sering menempati peringkat atas kinerja terbaik bursa kawasan. Niat menyatukan saham *blue chip* 5 bursa ASEAN dalam satu bursa terintegrasi, dinilai sebagai hal tak terelakkan seiring AEC.

Untuk Indonesia, diajukan 5 perusahaan yang dinilai paling kompetitif dalam bursa saham, yaitu Telkom, Bank Mandiri, BCA, Indofood, dan Gudang Garam dalam wacana awal integrasi bursa ASEAN. Ternyata wacana tersebut diperluas dengan tak menyatukan *blue chips* tertentu, tapi keseluruhan saham. Artinya, tuntutan akuntabilitas seiring *go public* dari tiap perusahaan yang *listing*, harus ditingkatkan dengan menyatukan cara pandang akuntabilitas dari regulator dan perusahaan yang *listing* di bursa dari negara ASEAN lainnya.

Meski demikian, penggabungan berbagai perusahaan *go public* diantara negara-negara ASEAN harus lebih dulu menemukan titik temu keseimbangan kompetitivitas yang sehat. Hal ini amat kentara pada Indonesia yang cenderung terlalu terbuka bagi perusahaan asing dalam mengincar “*potential market*” Indonesia, sehingga menyulitkan berbagai perusahaan Indonesia teruji di negara lain karena (ironisnya) cenderung dipersulit jika membangun anak usaha di negara Asia Tenggara lainnya. Apakah perusahaan Indonesia begitu tertinggalnya sehingga sangat sulit untuk bahkan sebatas menjadi “*Regional Player*”?

Ternyata bukan masalah kapabilitas atau kompetensi perusahaan asli Indonesia yang lemah. Tapi adalah lemahnya kebijakan pemerintah kita untuk meredam ekspansi bisnis perusahaan asing. Selalu saja pemerintah mengatakan bahwa tak mungkin lagi melakukan segala bentuk hambatan perdagangan di masa perdagangan bebas. Tapi nyatanya, pemerintah pula yang kesulitan, melalui BUMN unggulan, saat ingin mencoba masuk merambah pasar negara lain.

Bank dari Singapura, juga bank asing lainnya dari sesama negara Asia Tenggara, amat mudah kita jumpai bukan hanya di Jakarta, tapi mungkin hampir di semua kota besar di Indonesia. Maskapai negara-negara Asia Tenggara pun juga makin banyak memiliki rute antar kota di Indonesia dan antarnegara dari Indonesia ke kota di negara lain dan sebaliknya. Bahkan dalam salah satu klausul, maskapai dari Malaysia berhak mengambil penumpang dari 3 bandara di Indonesia yaitu Soekarno-Hatta, Cengkareng; Sultan Hasanuddin, Makassar dan Ngurah Rai, Denpasar, dimana rute yang diberikan maskapai Malaysia antara lain beberapa kota di Indonesia dan Australia dengan frekuensi 7 kali per minggu. Kelonggaran ini amat terkait terkait ASEAN Open Sky Policy yang akan direalisasi pada 2015.

Sementara kita melihat misal Bank Mandiri yang telah menduduki posisi bank ketujuh terbesar se-Asia Tenggara, amat kesulitan untuk mendirikan satu saja kantor di Kuala Lumpur. Belum lagi berbagai *franchise* asli Indonesia yang amat masif pertumbuhannya di dalam negeri, tapi ternyata cukup lambat pertumbuhannya di negara-negara ASEAN. Termasuk juga beberapa maskapai Indonesia, baik milik pemerintah atau swasta, yang mengeluh bahwa Open Sky justru tak berpihak bagi Indonesia karena terlalu sedikitnya tambahan rute yang diberikan ke maskapai Indonesia. Padahal baru-baru ini, Lion Air misalnya, melakukan transaksi yang terbesar dilakukan oleh Boeing, yaitu 230 pesawat baru dengan nilai 21,7 miliar dollar AS.

Bisa jadi, karena ingin berusaha “lebih adil dalam resiprositas”, maka pemerintah Malaysia mempermudah upaya Lion Air membangun anak usaha luar negeri di Malaysia, dengan hadirnya maskapai Low Cost Carrier Malindo Airlines. Dimana 49 persen saham Malindo Airlines dimiliki Lion Air, sementara 51 persen sisanya dimiliki otoritas Malaysia. Jika memang demikian, harusnya Garuda yang setelah *go public* secara aktif menambah armada dan memperbaiki interior dan pelayanan, juga diberi kesempatan lebih besar dan lebih kepada untuk mengakses berbagai bandara di Asia

Tenggara. Hal ini sebagai bentuk keadilan dimana maskapai nasional negara-negara Asia Tenggara juga diberi kesempatan yang cenderung terlalu luas pada bandara-bandara di Indonesia.

Padahal, bukannya perusahaan negara dan perusahaan swasta di Indonesia yang lemah. Dari yang besarnya sebesar BUMN, hingga tingkat usaha dengan cara *franchise*, Indonesia juga bisa memiliki perusahaan yang berkualitas. Tapi yang menjadi masalah ialah kurang kemampuan pemerintah kita mendesak asas *reciprocity*. Saat benar-benar perusahaan asing mengambil terlalu besar “kue” pangsa pasar dalam negeri, pemerintah kita baru merasa kecolongan dan buru-buru makin mendesak *reciprocity*.

Beban membangun keadilan dan pemerataan ekonomi ASEAN bukan semata dipikul Kamboja selaku Ketua ASEAN saat ini. Justru semua negara ASEAN harusnya tak menjadi egois untuk memakmurkan dirinya sendiri – sendiri. Bagaimanapun, percuma ASEAN menjalankan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) jika ketimpangan ekonomi antar negara ASEAN ternyata makin parah. Ini bukan semata menyangkut Indonesia. Harus diingat pula keadaan Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam, yang masih harus ditingkatkan kekuatannya.

Indonesia sebagai negara terbesar harus sadar betapa penduduk yang amat besar berkorelasi dengan makin aktifnya berbagai perusahaan asing memasarkan produk dan jasanya ke masyarakat kita. Harusnya, pemerintah Indonesia lebih giat lagi mendorong *reciprocity* dengan berbagai negara. Untuk memulainya, ialah pada tingkat ASEAN. Dimana jika mengacu prinsip ekonomi yang adil dan merata sebagai tujuan ideal MEA, Indonesia harus mendorong *reciprocity* bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga bagi negara ASEAN lainnya yang mungkin juga makin terdesak oleh perusahaan dari sesama ASEAN yang terlampau aktif meraup pangsa pasar suatu negara ASEAN dalam produk atau jasa tertentu.

Artinya, negara anggota ASEAN yang sudah lebih makmur, misalnya Singapura atau Malaysia, harusnya juga bersikap adil terhadap kemampuan ekspansi perusahaan negara ASEAN lainnya, dan bukan semata dari Indonesia. Karena sekalipun Indonesia secara signifikan mendapat hak *reciprocity* yang adil dalam pendirian usaha, harusnya juga memikirkan hak negara ASEAN lainnya yang masih dibawah kemampuan perekonomian Indonesia. Utamanya negara ASEAN di Semenanjung Indochina.

Berbagai perusahaan Singapura dan Malaysia memang diakui teruji kemampuan ekspansinya, karena bagaimanapun perusahaan setempat tak akan puas mendominasi pasar dalam negeri mereka yang jumlah penduduknya sedikit. Tapi bukan berarti kemampuan ekspansi bisnis yang amat baik kemudian membuat perusahaan utamanya dari 2 negara ini menjadi jumawa. Perusahaan-perusahaan *global player* dari dua negara ini juga harus mengakui kemampuan ekspansi mereka utamanya di pasar Asia Tenggara, tak lepas dari lemahnya daya tawar dari negara ASEAN lainnya, sehingga kadang membuat pemerintah 2 negara ini tak adil dengan melakukan syarat sedemikian ketat bagi usaha asing yang masuk ke pasar negara mereka.

Indonesia harus menyadari bahwa ketimpangan ekonomi yang makin besar tak akan menghadirkan kestabilan ekonomi di Asia Tenggara sekalipun dalam payung MEA. Indonesia harus ikut membantu Kamboja, yang sejatinya kekuatannya masih lemah, agar pemerintah Kamboja lebih berani mendesak tiap negara ASEAN menyepakati proses distribusi ekonomi yang lebih merata dan adil di Asia Tenggara. Bukan semata memuluskan asas *reciprocity* di tiap negara ASEAN, tapi lebih kepada

perlindungan bagi negara anggota ASEAN yang belum siap secara produktivitas ekonomi dan rentan terlalu dikuasai perusahaan asing untuk pangsa pasar suatu produk atau jasa.

Meski demikian, repositas di seluruh ASEAN sekalipun tercapai, juga percuma jika suatu negara ASEAN tak membantu perkembangan tiap perusahaan dari negara tersebut. Pemerintah Indonesia jangan sebatas membiarkan perusahaan negara dan swasta unggulan untuk bersaing tanpa pendampingan memadai. Komitmen pemerintah harus selalu ditagih untuk, setidaknya, membuat iklim usaha yang positif dan memperbanyak infrastruktur yang memadai. Agar biaya ekonomi tinggi yang dikeluhkan pengusaha Indonesia, bisa ditekan seminim mungkin. Dengan demikian, pembangunan ekonomi Indonesia bisa tetap optimal saat menjalani AEC 2015, sembari membantu pertumbuhan ekonomi secara regional.

Daftar Pustaka

Buku

- Arner, Douglas. 2007. *Impediments To Cross Border Investmens In Asian Bonds*. Singapore: ISEAS.
- Chellaney, Brahma. 2010. *Asian Juggernaut : The Rise of China, India, & Japan*. New York: Harper Business.
- Chufrin, Gennady. 2007. *Between Regionalism & Globalism*. Singapore: ISEAS.
- Drysdale, John. 1984. *Singapore : Struggle for Success*. Singapore: Times Book.
- Eisenstein, Charles. 2011. *Sacred Economics: Money, Gift, and Society in the Age of Transition*. New York: Evolver.
- Nathan, K. S.. 2001. *Economic Slowdown & Domestic Politics: Malaysia Boleh?* Singapore: ISEAS.
- IMF. 2012. *IMF Country Report: Indonesia*. Washington D.C.: IMF Publication Services.
- Nesadurai, Helen dan Soedradjad Djiwandono. 2008. *Southeast Asia in the Global Economy*. Singapore: ISEAS.
- Stiglitz, Joseph. 2009. *Freefall: America, Freemarkets, and the Sinking of the World Economy*. New York: Norton.
- World Bank. 2012. *China 2030 : Building a Modern, Harmonious, and Creative High – Income Society*. Washington D.C.: World Bank Publishing.